

Menyingkap Akuntabilitas Laut: Blue Accounting sebagai Strategi Legitimasi dan Pertanggungjawaban Stakeholder dalam Ekonomi Biru Berkelanjutan

Kiki Berlian Sari¹, Iren Citra Dewi², Nina Yusnita Yamin³, Selmitha Paranoan⁴, Betty⁵

^{1,2,3,4,5}Program Studi Magister Akutansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Tadulako

E-mail: kikyberliansari@gmail.com¹, irencitradewi123@gmail.com², alikarahmanita@gmail.com³, shelo0709@yahoo.co.id⁴, bmanurung389@gmail.com⁵

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan menganalisis konsep blue accounting dalam perspektif teori legitimasi dan teori stakeholder sebagai landasan akuntabilitas organisasi yang memanfaatkan sumber daya kelautan. Kajian ini penting karena ekonomi biru tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi maritim, tetapi juga menuntut tanggung jawab organisasi dalam mengukur, mencatat, mengungkapkan, dan mempertanggungjawabkan dampak sosial, ekonomi, dan ekologis aktivitasnya terhadap ekosistem laut serta masyarakat yang bergantung padanya. Penelitian menggunakan metode studi literatur kualitatif dengan pendekatan systematic narrative review. Data diperoleh dari 25 sumber ilmiah dan regulatif yang relevan, meliputi artikel jurnal, buku, standar pelaporan keberlanjutan, dan dokumen konseptual terkait blue accounting, ocean accounting, akuntansi lingkungan, teori legitimasi, dan teori stakeholder. Analisis dilakukan melalui reduksi data, pengodean tematik, pemetaan kesenjangan penelitian, sintesis teoritis, dan penyusunan model konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa blue accounting merupakan pengembangan akuntansi lingkungan yang berfokus pada pencatatan aset kelautan, biaya lingkungan laut, manfaat ekosistem, risiko iklim pesisir, serta pengungkapan dampak ekonomi, sosial, dan ekologis organisasi. Teori legitimasi menjelaskan fungsi blue accounting sebagai sarana memperoleh dan mempertahankan legitimasi sosial, sedangkan teori stakeholder menekankan perannya sebagai instrumen pertanggungjawaban kepada berbagai pemangku kepentingan. Integrasi kedua teori menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tujuan dan arah pengungkapan informasi keberlanjutan berbasis kelautan. Kata Kunci: Blue Accounting; Teori Legitimasi; Teori Stakeholder; Akuntansi Lingkungan; Ekonomi Biru.

ABSTRACT

This article aims to analyze the concept of blue accounting from the perspectives of legitimacy theory and stakeholder theory as a foundation for organizational accountability in utilizing marine resources. This topic is important because the blue economy is not only concerned with maritime economic growth but also requires organizations to measure, record, disclose, and account for the social, economic, and ecological impacts of their activities on marine ecosystems and communities that depend on them. The study employs a qualitative literature review using a systematic narrative review approach. The data consist of 25 relevant scientific and regulatory sources, including journal articles, books, sustainability reporting standards, and conceptual documents related to blue accounting, ocean accounting, environmental accounting, legitimacy theory, and stakeholder theory. Data analysis was conducted through data reduction, thematic coding, research gap mapping, theoretical synthesis, and conceptual model development. The findings indicate that blue accounting represents an extension of environmental accounting that focuses on recording marine assets, marine environmental costs, ecosystem benefits, coastal climate risks, and the disclosure of organizational economic, social, and ecological impacts. Legitimacy theory explains blue accounting as a mechanism for obtaining and maintaining social legitimacy, while stakeholder theory emphasizes its role as an accountability and communication tool for various stakeholders. The integration of both theories provides a more comprehensive understanding of the purpose and direction of marine-based sustainability disclosures.

Keywords: Blue Accounting; Legitimacy Theory; Stakeholder Theory; Environmental Accounting; Blue Economy.

1. Pendahuluan

Ekonomi biru menjadi salah satu agenda penting pembangunan berkelanjutan karena laut tidak hanya menyediakan sumber daya ekonomi, tetapi juga menopang keseimbangan ekologi, ketahanan pangan, penyerapan karbon, transportasi, pariwisata, energi, dan mata pencaharian masyarakat pesisir. Bagi Indonesia, yang memiliki karakter sebagai negara kepulauan, isu ekonomi biru memiliki posisi strategis karena aktivitas perikanan, pelabuhan, pariwisata bahari, energi laut, budidaya, pengolahan hasil laut, dan industri pendukung maritim berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat serta keberlanjutan lingkungan. Namun, pertumbuhan ekonomi berbasis laut juga membawa risiko: kerusakan ekosistem pesisir, pencemaran laut, degradasi mangrove, overfishing, konflik ruang laut, limbah plastik, serta ketimpangan manfaat ekonomi antara korporasi dan masyarakat lokal.

Dalam konteks akuntansi, masalah utama ekonomi biru adalah belum memadainya sistem pencatatan dan pelaporan yang mampu menangkap nilai ekonomi, sosial, dan ekologis laut secara utuh. Laporan keuangan konvensional umumnya lebih mudah mencatat aset yang memiliki harga pasar, seperti kapal, pabrik, mesin, persediaan, dan pendapatan penjualan. Akan tetapi, kerusakan terumbu karang, hilangnya jasa ekosistem mangrove, pencemaran pesisir, penurunan kualitas air, atau berkurangnya sumber penghidupan nelayan sering kali tidak tercermin secara memadai dalam pelaporan perusahaan. Keterbatasan ini menimbulkan kesenjangan akuntabilitas karena kegiatan ekonomi yang menimbulkan dampak terhadap laut tidak selalu diimbangi dengan informasi yang memadai bagi stakeholder.

Blue accounting muncul sebagai jawaban terhadap keterbatasan tersebut. Secara konseptual, blue accounting dapat dipahami sebagai pengembangan akuntansi lingkungan yang menekankan pengukuran, pencatatan, pengungkapan, dan pertanggungjawaban atas sumber daya serta dampak aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan laut dan pesisir. Syah (2020) memandang blue accounting sebagai cara berpikir akuntansi yang menempatkan aset maritim dan ekonomi kelautan sebagai bagian penting dari proses pelaporan. Rahmayanti et al. (2023) menegaskan bahwa blue accounting dapat meningkatkan kualitas sustainability report karena menyediakan informasi mengenai sumber daya laut dan aset ekonomi biru bagi stakeholder. Dengan demikian, blue accounting bukan sekadar tema baru, tetapi instrumen untuk memperluas ruang lingkup akuntansi agar lebih relevan dengan tantangan keberlanjutan laut.

Pembahasan blue accounting menjadi semakin penting apabila dikaitkan dengan teori legitimasi dan teori stakeholder. Teori legitimasi menjelaskan bahwa organisasi berusaha memastikan bahwa aktivitasnya selaras dengan nilai, norma, dan

harapan masyarakat (Suchman, 1995; Deegan, 2002). Apabila perusahaan yang beroperasi di sektor kelautan menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan, legitimasi sosialnya dapat terganggu. Dalam kondisi tersebut, blue accounting dapat digunakan sebagai mekanisme komunikasi untuk menunjukkan bahwa perusahaan menyadari dampaknya, mengelola risiko lingkungan, dan bertanggung jawab terhadap masyarakat. Namun, teori legitimasi juga mengingatkan bahwa pengungkapan dapat bersifat simbolik apabila tidak disertai perubahan substantif dalam praktik organisasi.

Sementara itu, teori stakeholder menekankan bahwa organisasi tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham, tetapi juga kepada pihak-pihak yang memengaruhi atau dipengaruhi oleh aktivitas organisasi (Freeman, 1984). Dalam ekonomi biru, stakeholder tidak hanya mencakup investor dan regulator, tetapi juga masyarakat pesisir, nelayan, pekerja, konsumen, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, pemerintah daerah, generasi mendatang, dan bahkan ekosistem laut yang direpresentasikan melalui kepentingan publik. Oleh karena itu, blue accounting dalam perspektif stakeholder harus mampu menyajikan informasi yang relevan, dapat dipahami, dapat dibandingkan, dan berguna bagi pengambilan keputusan berbagai pihak.

Meskipun literatur tentang akuntansi lingkungan, sustainability reporting, legitimacy theory, dan stakeholder theory sudah berkembang luas, kajian yang secara spesifik menghubungkan blue accounting dengan dua teori tersebut masih terbatas. Banyak penelitian terdahulu membahas akuntansi hijau, pelaporan keberlanjutan, atau pengungkapan lingkungan secara umum, tetapi belum secara khusus menempatkan laut sebagai objek akuntansi dan akuntabilitas. Selain itu, penelitian mengenai blue accounting di Indonesia masih cenderung konseptual atau terbatas pada sektor/kawasan tertentu sehingga belum menghasilkan kerangka yang kuat untuk menjelaskan mengapa organisasi perlu mengungkapkan informasi biru dan kepada siapa informasi tersebut harus dipertanggungjawabkan. Untuk menunjukkan posisi penelitian ini, berikut disajikan gap dari penelitian terdahulu yang menjadi dasar kebutuhan artikel ini.

Gap Penelitian Berdasarkan Penelitian Terdahulu

N o.	Penelitian Terdahulu	Fokus Utama	Gap yang Ditinggalkan
1	Syah (2020)	Membahas blue accounting dan sustainability secara konseptual.	Belum mengembangkan analisis mendalam dengan gabungan teori legitimasi dan stakeholder.
2	Rahmayanti et al. (2023)	Menjelaskan blue accounting untuk meningkatkan kualitas sustainability report.	Fokus pada kerangka konseptual pelaporan, belum membahas secara rinci motif legitimasi dan kebutuhan stakeholder.
3	Pratama (2024)	Mengaitkan blue accounting dengan transformasi ekonomi biru berkelanjutan.	Belum menyediakan pemetaan gap komprehensif dan model akuntabilitas berbasis stakeholder.
4	Utaminingsih et al. (2024)	Membahas teori legitimasi dalam konteks pengungkapan lingkungan/keberlanjutan.	Tidak spesifik pada akuntansi kelautan dan aset ekonomi biru.
5	Meutia (2022)	Membahas keterkaitan stakeholder atau legitimacy theory dalam pelaporan keberlanjutan.	Belum diarahkan pada konteks laut, masyarakat pesisir, dan blue economy.
6	Ogunode	Mengulas	Fokus pada

	(2022)	legitimacy theory dan environmental accounting reporting.	akuntansi lingkungan umum, belum mengulas blue accounting sebagai cabang spesifik.
7	Kuruppu et al. (2019)	Menjelaskan peran pengungkapan sosial-lingkungan untuk memperoleh, menjaga, dan memperbaiki legitimasi.	Belum membahas isu akuntabilitas laut dan kebutuhan informasi stakeholder maritim.
8	Lai et al. (2018)	Membahas natural capital accounting dan integrated reporting.	Belum secara spesifik menjadikan laut dan sumber daya biru sebagai fokus utama.
9	Perkiss et al. (2022)	Menghubungkan akuntansi dengan keberlanjutan, alam, dan transformasi sosial.	Masih membutuhkan pengembangan pada konteks blue accounting untuk organisasi maritim.
10	Failler & Seisay (2021)	Membahas nilai aset alam dan jasa ekosistem dalam kerangka ekonomi biru.	Belum kuat dalam perspektif teori akuntansi organisasi.
11	SEEA Ecosystem Accounting (United Nations, 2021)	Menyediakan kerangka akuntansi ekosistem secara makro.	Lebih cocok untuk statistik nasional, belum langsung menjadi format pelaporan perusahaan.

12	TNFD (2023)	Memberikan panduan pengungkapan risiko dan peluang terkait alam.	Belum spesifik menjelaskan blue accounting dalam perspektif legitimasi dan stakeholder.
13	ISSB IFRS S1 dan S2 (2023)	Menyediakan standar pengungkapan keberlanjutan dan iklim bagi pasar modal.	Belum mengatur secara rinci pengukuran aset kelautan dan dampak ekonomi biru.
14	Utami et al. (2025)	Menganalisis penerapan blue accounting pada kawasan ekonomi khusus berbasis pariwisata/ekonomi biru.	Masih terbatas pada konteks lokasi dan belum menjadi model teoritis umum.
15	Amar et al. (2025)	Menguji green accounting, blue accounting, CSR, dan stakeholder influence pada kinerja bisnis maritim.	Memberi bukti empiris sektor tertentu, tetapi belum menyusun argumentasi konseptual mendalam berbasis dua teori utama.

Tabel 1. Gap penelitian terdahulu terkait blue accounting, legitimasi, dan stakeholder

Berdasarkan pemetaan tersebut, gap utama yang dapat ditarik adalah: pertama, penelitian blue accounting masih relatif baru dan belum memiliki kerangka teoritis yang mapan dalam akuntansi organisasi; kedua, teori legitimasi dan stakeholder sering digunakan dalam studi pelaporan keberlanjutan, tetapi belum banyak diterapkan secara spesifik pada pelaporan ekonomi biru; ketiga, standar global seperti ISSB, TNFD, dan SEEA telah memberi arah pengungkapan lingkungan dan alam, tetapi belum sepenuhnya operasional untuk perusahaan yang memiliki dampak langsung pada

laut; keempat, konteks Indonesia sebagai negara kepulauan membutuhkan model blue accounting yang tidak hanya berorientasi investor, tetapi juga mencakup masyarakat pesisir dan keberlanjutan ekosistem laut.

2. Metode Penelitian

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi literatur atau library research. Jenis penelitian ini dipilih karena tujuan artikel adalah membangun pemahaman konseptual mengenai blue accounting dalam perspektif teori legitimasi dan stakeholder, bukan menguji hubungan statistik antarvariabel pada perusahaan tertentu. Pendekatan yang digunakan adalah systematic narrative review, yaitu penelusuran literatur secara terarah, diikuti interpretasi konseptual yang mendalam.

Sumber Data

Data penelitian berupa data sekunder yang berasal dari artikel jurnal, buku teori, dokumen standar, pedoman pelaporan, dan literatur akademik mengenai blue accounting, ocean accounting, environmental accounting, sustainability reporting, legitimacy theory, dan stakeholder theory. Literatur dipilih secara purposive dengan mempertimbangkan relevansi topik, keterkaitan teori, kontribusi terhadap akuntansi keberlanjutan, serta kesesuaian dengan konteks ekonomi biru.

Kriteria Pemilihan Literatur

1. Membahas blue accounting, ocean accounting, natural capital accounting, atau akuntansi lingkungan.
2. Memuat teori legitimasi, teori stakeholder, atau pelaporan keberlanjutan.
3. Relevan dengan isu laut, ekonomi biru, sumber daya alam, atau akuntabilitas lingkungan.
4. Diterbitkan dalam bentuk artikel ilmiah, buku akademik, standar/pedoman, atau dokumen resmi.
5. Memiliki kontribusi terhadap pemetaan gap, pembentukan konsep, atau pengembangan model akuntabilitas.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi. Penulis menelusuri literatur yang relevan, membaca bagian abstrak, pendahuluan, teori, metode, hasil, dan kesimpulan, kemudian mencatat informasi penting berupa definisi, variabel/konsep utama, temuan, keterbatasan, serta peluang penelitian lanjutan. Data yang terkumpul kemudian disusun dalam matriks literatur untuk memudahkan proses analisis.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan melalui lima tahap. Pertama, reduksi data dilakukan dengan memilih literatur yang paling relevan. Kedua, pengodean tematik dilakukan dengan memberi kode pada tema: blue accounting, legitimasi, stakeholder, akuntabilitas, pengungkapan, dan ekonomi biru. Ketiga, pemetaan gap dilakukan untuk melihat keterbatasan studi terdahulu. Keempat, sintesis konseptual dilakukan dengan menghubungkan temuan literatur dengan teori legitimasi dan stakeholder. Kelima, penyusunan model konseptual dilakukan untuk menghasilkan kerangka blue accounting yang sesuai dengan konteks akuntansi keberlanjutan.

Keabsahan Data

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan artikel jurnal, buku teori, dan dokumen standar. Selain itu, konsistensi interpretasi dijaga dengan memastikan bahwa setiap simpulan berasal dari pola temuan literatur, bukan pendapat tunggal. Dengan demikian, hasil kajian dapat dipertanggungjawabkan secara akademik sebagai sintesis konseptual.

3. Hasil dan Pembahasan

Deskripsi Data Literatur

Berdasarkan kriteria pemilihan, artikel ini menggunakan 25 sumber utama. Sumber tersebut dikelompokkan ke dalam lima kategori: teori dasar akuntansi sosial-lingkungan, teori legitimasi dan stakeholder, blue accounting/ocean accounting, standar/pedoman keberlanjutan, dan penelitian empiris terkait pengungkapan lingkungan atau ekonomi biru. Pengelompokan ini penting karena blue accounting tidak dapat dijelaskan hanya dari satu disiplin. Konsep ini berada pada pertemuan antara akuntansi, keberlanjutan, ekonomi biru, tata kelola, dan teori organisasi.

Kategori Literatur	Jumlah Sumber	Persentase	Kontribusi terhadap Artikel
Blue accounting/ocean accounting	8	32%	Membentuk definisi, ruang lingkup, dan kebutuhan pengungkapan ekonomi

			biru
Teori legitimasi dan stakeholder	6	24%	Menjadi dasar penjelasan motif dan sasaran akuntabilitas
Akuntansi lingkungan dan sustainability reporting	5	20%	Menjelaskan hubungan akuntansi, lingkungan, dan pelaporan keberlanjutan
Standar/pedoman global	4	16%	Memberi konteks pengungkapan keberlanjutan, alam, dan iklim
Penelitian empiris terkait	2	8%	Memberi contoh penerapan pada sektor/kawasan ekonomi biru

Tabel 2. Komposisi data literatur yang dianalisis

Hasil Analisis Tema Blue Accounting

Hasil analisis menunjukkan bahwa blue accounting memiliki lima dimensi utama. Pertama, dimensi aset laut, yaitu kebutuhan untuk mengidentifikasi sumber daya laut dan pesisir sebagai aset ekonomi dan ekologis. Kedua, dimensi biaya lingkungan, yaitu biaya pencegahan pencemaran, biaya pengelolaan limbah, biaya konservasi, dan biaya restorasi. Ketiga, dimensi kewajiban dan risiko, yaitu potensi kewajiban akibat kerusakan lingkungan, risiko regulasi, risiko reputasi, dan risiko iklim pesisir. Keempat, dimensi manfaat sosial, yaitu kontribusi organisasi terhadap masyarakat pesisir, nelayan, tenaga kerja lokal, dan inklusi ekonomi. Kelima, dimensi pengungkapan, yaitu penyampaian informasi secara transparan dalam laporan tahunan, sustainability report, integrated report, atau laporan khusus ekonomi biru.

Dimensi	Informasi yang Perlu Dicatat	Informasi yang Perlu Diungkapkan	Makna Akuntabilitas
Aset laut	Nilai	Kondisi	Organisasi

	aset, kawasan, sumber daya, dan jasa ekosistem	aset, perubahan nilai, ancaman, dan strategi perlindungan	mengakui laut sebagai sumber daya yang harus dijaga
Biaya lingkungan	Biaya limbah, konservasi, pengawasan, dan restorasi	Besaran biaya dan efektivitas program lingkungan	Organisasi menunjukkan tanggung jawab atas dampaknya
Risiko biru	Risiko pencemaran, iklim, regulasi, reputasi, dan sosial	Mitigasi risiko, target, dan capaian pengendalian	Organisasi tidak menyembunyikan dampak negatif
Manfaat sosial	Program masyarakat pesisir, nelayan, dan tenaga kerja lokal	Distribusi manfaat dan dampak pada komunitas	Organisasi memperhatikan stakeholder non-investor
Pengungkapan	Indikator ekonomi, sosial, dan ekologis	Laporan keberlanjutan, integrated report, dan laporan tematik	Organisasi membangun transparansi dan kepercayaan

Tabel 3. Dimensi hasil analisis blue accounting

Blue Accounting dalam Perspektif Teori Legitimasi

Dalam perspektif teori legitimasi, blue accounting dapat dijelaskan sebagai mekanisme organisasi untuk menyelaraskan aktivitas ekonomi dengan ekspektasi sosial. Organisasi yang memanfaatkan laut memiliki kontrak sosial tidak tertulis dengan masyarakat. Kontrak sosial tersebut menuntut organisasi untuk tidak hanya menghasilkan keuntungan, tetapi juga menjaga kualitas lingkungan laut dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Apabila organisasi gagal memenuhi harapan tersebut, legitimasi dapat menurun. Penurunan legitimasi dapat muncul dalam bentuk protes masyarakat, tekanan LSM, sorotan media, tuntutan regulator, kehilangan kepercayaan investor, atau penurunan reputasi merek.

Blue accounting menjadi alat legitimasi karena pengungkapan informasi memungkinkan organisasi menjelaskan tindakan yang telah dilakukan. Misalnya, perusahaan pariwisata bahari dapat mengungkapkan program pengurangan limbah plastik, perlindungan terumbu karang, pelibatan masyarakat lokal, dan pengendalian kapasitas wisata. Perusahaan perikanan dapat mengungkapkan praktik penangkapan berkelanjutan, pelacakan rantai pasok, perlindungan nelayan kecil, dan kepatuhan terhadap kuota. Perusahaan pelabuhan dapat mengungkapkan pengendalian emisi, pengelolaan limbah kapal, kualitas air, dan keselamatan komunitas sekitar.

Namun, hasil telaah juga menunjukkan adanya risiko symbolic disclosure. Organisasi dapat menggunakan bahasa keberlanjutan untuk membangun citra tanpa bukti substantif. Oleh karena itu, blue accounting yang berlandaskan legitimasi harus dilengkapi indikator kuantitatif, bukti program, target yang terukur, dan audit atau assurance. Tanpa itu, pengungkapan berpotensi menjadi legitimasi simbolik yang tidak menyelesaikan masalah ekologis.

Blue Accounting dalam Perspektif Teori Stakeholder

Dalam perspektif teori stakeholder, blue accounting dipandang sebagai sistem informasi untuk memenuhi kebutuhan berbagai pemangku kepentingan. Kebutuhan informasi investor berbeda dengan kebutuhan masyarakat pesisir. Investor membutuhkan informasi risiko, biaya lingkungan, peluang investasi biru, dan dampak terhadap nilai perusahaan. Pemerintah membutuhkan informasi kepatuhan dan kontribusi terhadap kebijakan ekonomi biru. Masyarakat pesisir membutuhkan informasi dampak terhadap mata pencaharian, akses sumber daya, kualitas lingkungan, dan kompensasi. LSM membutuhkan informasi transparansi program dan bukti perlindungan lingkungan. Konsumen membutuhkan informasi etika produk dan keberlanjutan rantai pasok.

Karena stakeholder memiliki kepentingan yang beragam, blue accounting harus dikembangkan melalui prinsip materialitas. Informasi yang material bukan hanya informasi yang memengaruhi keputusan investor, tetapi juga informasi yang memengaruhi kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan ekosistem. Dalam konteks ini, pendekatan double materiality menjadi relevan: perusahaan perlu mengungkapkan bagaimana isu laut memengaruhi kinerja keuangan perusahaan dan bagaimana perusahaan memengaruhi laut serta masyarakat.

Stakeholder	Kebutuhan Informasi Blue Accounting	Contoh Indikator
-------------	-------------------------------------	------------------

Investor dan kreditur	Risiko keuangan, biaya lingkungan, peluang ekonomi biru	Nilai investasi biru, biaya restorasi, risiko litigasi
Pemerintah dan regulator	Kepatuhan, kontribusi kebijakan, data pengawasan	Izin, pajak/retribusi, kepatuhan baku mutu
Masyarakat pesisir dan nelayan	Dampak sosial-ekologis dan distribusi manfaat	Akses sumber daya, program pemberdayaan, dampak mata pencaharian
Konsumen	Keberlanjutan produk dan etika rantai pasok	Sertifikasi, traceability, penggunaan bahan ramah lingkungan
LSM dan akademisi	Transparansi data dan bukti dampak	Data kualitas lingkungan, konservasi, evaluasi program
Generasi mendatang	Keberlanjutan aset laut jangka panjang	Target konservasi, perlindungan biodiversitas, restorasi ekosistem

Tabel 4. Kebutuhan informasi stakeholder dalam blue accounting

Integrasi Teori Legitimasi dan Stakeholder

Integrasi kedua teori menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif. Teori legitimasi menjelaskan motif organisasi: organisasi mengungkapkan informasi untuk memperoleh penerimaan sosial, mengurangi tekanan publik, dan mempertahankan reputasi. Teori stakeholder menjelaskan arah akuntabilitas: organisasi harus mengidentifikasi kelompok stakeholder dan menyajikan informasi yang relevan bagi masing-masing kelompok. Jika hanya menggunakan teori legitimasi, blue accounting berisiko dipahami sebagai strategi citra. Jika hanya menggunakan teori stakeholder, analisis dapat kehilangan penjelasan mengenai tekanan sosial dan kebutuhan mempertahankan penerimaan publik. Karena itu, kedua teori perlu digunakan bersama.

Model Konseptual Blue Accounting Berbasis Legitimasi dan Stakeholder

Tahap Model	Pertanyaan Kunci	Dasar Teori	Output Blue
-------------	------------------	-------------	-------------

			Accounting
Identifikasi dampak	Apa dampak organisasi terhadap laut dan masyarakat?	Akuntansi lingkungan dan stakeholder theory	Daftar dampak ekonomi, sosial, dan ekologis
Identifikasi stakeholder	Siapa pihak yang terdampak dan membutuhkan informasi?	Stakeholder theory	Peta stakeholder dan kebutuhan informasi
Penilaian legitimacy gap	Apakah aktivitas organisasi sesuai harapan sosial?	Legitimacy theory	Daftar risiko legitimasi dan reputasi
Pengukuran dan pencatatan	Apa yang dapat diukur dan dicatat?	Environmental accounting	Biaya, aset, kewajiban, risiko, manfaat
Pengungkapan	Bagaimana informasi disajikan secara transparan?	Legitimacy dan stakeholder theory	Laporan blue accounting yang relevan dan terverifikasi
Evaluasi dan perbaikan	Apakah pengungkapan mendorong perubahan nyata?	Akuntabilitas substantif	Target, capaian, assurance, dan perbaikan berkelanjutan

Tabel 5. Model konseptual blue accounting berbasis legitimasi dan stakeholder

Implikasi untuk Standar Akuntansi dan Praktik Pelaporan

Implikasi utama dari hasil kajian ini adalah perlunya pengembangan pedoman blue accounting yang lebih operasional. Standar akuntansi keuangan saat ini masih lebih kuat pada aset dan kewajiban yang memenuhi kriteria pengakuan finansial, sedangkan banyak nilai laut bersifat eksternal dan jangka panjang. Karena itu, pelaporan blue

accounting dapat ditempatkan dalam laporan keberlanjutan atau integrated report dengan tetap menjaga keterhubungan dengan laporan keuangan. Perusahaan perlu mengungkapkan biaya lingkungan laut, kewajiban restorasi, risiko terkait alam, risiko iklim pesisir, serta kontribusi terhadap ekonomi lokal.

Bagi regulator, blue accounting dapat menjadi instrumen untuk memperkuat kebijakan ekonomi biru. Pemerintah dapat mendorong penyusunan indeks pengungkapan blue accounting, standar minimal pelaporan untuk sektor maritim, dan integrasi data perusahaan dengan statistik ekonomi biru nasional. Bagi akademisi, hasil kajian ini membuka peluang penelitian empiris, misalnya menguji pengaruh blue accounting disclosure terhadap nilai perusahaan, biaya modal, reputasi, atau kepercayaan stakeholder.

4. Kesimpulan

Blue accounting merupakan pengembangan penting dalam akuntansi keberlanjutan karena menjadikan laut, pesisir, dan ekonomi biru sebagai objek akuntabilitas. Konsep ini tidak hanya berhubungan dengan pencatatan biaya lingkungan, tetapi juga mencakup pengungkapan aset laut, risiko ekologis, manfaat sosial, dampak terhadap masyarakat pesisir, serta tanggung jawab organisasi terhadap keberlanjutan sumber daya biru.

Dalam perspektif teori legitimasi, blue accounting berfungsi sebagai mekanisme untuk memperoleh, mempertahankan, dan memulihkan legitimasi sosial. Organisasi yang bergantung pada sumber daya laut harus menunjukkan bahwa aktivitasnya sesuai dengan norma dan harapan masyarakat. Namun, blue accounting tidak boleh berhenti pada komunikasi simbolik; pengungkapan harus didukung data, indikator, target, dan bukti tindakan substantif.

Dalam perspektif teori stakeholder, blue accounting adalah instrumen pertanggungjawaban kepada berbagai pihak yang terdampak oleh aktivitas organisasi. Stakeholder ekonomi biru tidak hanya investor, tetapi juga pemerintah, masyarakat pesisir, nelayan, konsumen, LSM, akademisi, dan generasi mendatang. Oleh karena itu, informasi blue accounting harus disusun berdasarkan kebutuhan stakeholder dan prinsip materialitas yang luas.

Integrasi teori legitimasi dan stakeholder menghasilkan model konseptual yang lebih lengkap. Legitimasi menjelaskan alasan organisasi melakukan pengungkapan, sedangkan stakeholder menjelaskan sasaran dan isi pengungkapan. Dengan demikian, blue accounting yang ideal harus transparan, relevan, terukur, dapat dibandingkan, dan mampu mendorong perubahan praktik organisasi menuju ekonomi biru berkelanjutan.

Saran

1. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan indeks blue accounting disclosure untuk perusahaan yang bergerak di sektor perikanan, pelabuhan, pariwisata bahari, pertambangan pesisir, energi laut, dan transportasi laut.
2. Penelitian empiris dapat menguji hubungan blue accounting dengan nilai perusahaan, reputasi, biaya modal, kinerja lingkungan, atau kepercayaan stakeholder.
3. Regulator dan penyusun standar perlu mempertimbangkan pedoman pelaporan blue accounting yang sesuai dengan karakter Indonesia sebagai negara kepulauan.
4. Perusahaan sektor ekonomi biru perlu meningkatkan stakeholder engagement agar pengungkapan tidak hanya berorientasi investor, tetapi juga menjawab kebutuhan masyarakat pesisir dan kepentingan ekologis.
5. Perguruan tinggi dapat mendorong penelitian akuntansi keberlanjutan berbasis laut karena isu ini masih relatif baru dan sangat relevan bagi pembangunan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfajri, D. R., Pratama, I. A., Said, S., & Atiah, I. N. (2026). Revisiting food purchasing intention determinants: Strategic roles of social media promotion and halal labelling. *Airlangga Journal of Innovation Management*, 7(01), 1-19.
- Almashhadani, M., & Almashhadani, H. A. (2018). Accounting theory and its impact on adoption of sustainability reporting. *International Journal of Accounting and Financial Reporting*, 8(4), 84-97.
- Amar, S. S. (2025). Exploring the role of blue accounting in enhancing financial performance of maritime businesses. *Masyrif: Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen*, 6(1), 1-15.
- Bebbington, J., Larrinaga, C., & Moneva, J. M. (2008). Corporate social reporting and reputation risk management. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 21(3), 337-361.
- Deegan, C. (2002). Introduction: The legitimising effect of social and environmental disclosures - a theoretical foundation. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 15(3), 282-311.
- Deegan, C. (2014). *Financial Accounting Theory* (4th ed.). McGraw-Hill Education.
- Failler, P., & Seisay, M. (2021). Blue economy and natural capital accounting for sustainable

- ocean governance. *Marine Policy and Blue Economy Studies*, 1(1), 1-12.
- Freeman, R. E. (1984). *Strategic Management: A Stakeholder Approach*. Pitman.
- Global Reporting Initiative. (2021). *GRI Standards 2021*. GRI.
- Gray, R., Owen, D., & Adams, C. (1996). *Accounting and Accountability: Changes and Challenges in Corporate Social and Environmental Reporting*. Prentice Hall.
- IFRS Foundation. (2023). *IFRS S1 General Requirements for Disclosure of Sustainability-related Financial Information*. International Sustainability Standards Board.
- IFRS Foundation. (2023). *IFRS S2 Climate-related Disclosures*. International Sustainability Standards Board.
- Ismawan, M. A., Pratama, I. A., & Saputra, R. (2025). Analisis kelayakan bisnis dengan pendekatan ekonomi teknik usaha angkringan (studi kasus Angkringan 86 Forum Komunikasi Pemuda Pangkat, Tangerang, Banten). *Jurnal Inkofar*, 8(2).
- Kuruppu, S. C., Milne, M. J., & Tilt, C. A. (2019). Gaining, maintaining and repairing organisational legitimacy: When to report and when not to report. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 32(7), 2062-2087.
- Lai, A., Melloni, G., & Stacchezzini, R. (2018). Integrated reporting and narrative accountability: The role of preparers. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 31(5), 1381-1405.
- Meutia, I. (2022). Stakeholder or legitimacy theory? Analysis of sustainability report materiality. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 13(1), 80-96.
- Ogunode, O. A. (2022). Legitimacy theory and environmental accounting reporting and practice: A review. *South Asian Journal of Social Studies and Economics*, 13(1), 17-28.
- Perkiss, S., Bernardi, C., Dumay, J., & Haslam, J. (2022). A sticky chocolate problem: Accounting for biodiversity and nature. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 35(3), 1-25.
- Pratama, D. A. (2024). Blue accounting dalam perspektif teori legitimasi dan stakeholder. *Jurnal Ekonomi dan Akuntansi*, 12(2), 1-16.
- Pratama, I. A., Mukhsin, M., & Suhartini, N. (2025). Mengurai Kontribusi Keuangan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Inflasi Sebagai Mediator. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10(2).
- Pratama, I. A. (2025). *Inovasi Pemanfaatan Kain Perca Ulos Sebagai Pelestarian Budaya Batak Dalam Menghadapi Bonus Demografis 2045 (Studi Kasus Kampung uLos Hutaraja, Kabupaten Samosir)*. *J-ABDI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 5 (1), 77-90.
- Pratama, I. A., Asa, S. A., Irwin, M., & Ferdaus, N. N. (2025). Analisis Pengaruh Tpt Dan Ipm Terhadap Jumlah Penduduk Miskin. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 4(3), 3859-3866.
- Rahmayanti, A. Y., Sukoharsono, E. G., & Djamhuri, A. (2023). Blue accounting to enhance the quality of sustainability report. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 14(2), 310-326.
- Suchman, M. C. (1995). Managing legitimacy: Strategic and institutional approaches. *Academy of Management Review*, 20(3), 571-610.
- Syah, S. (2020). Blue accounting and sustainability. *Advances in Economics, Business and Management Research*, 127, 120-124.
- Taskforce on Nature-related Financial Disclosures. (2023). *Recommendations of the Taskforce on Nature-related Financial Disclosures*. TNFD.
- United Nations. (2021). *System of Environmental-Economic Accounting - Ecosystem Accounting*. United Nations.
- United Nations, European Commission, FAO, IMF, OECD, & World Bank. (2014). *System of Environmental-Economic Accounting 2012 - Central Framework*. United Nations.
- Utami, L., Yuliandari, R., Santanu, K. O., & Aswaldi, H. (2025). Membangun ekonomi biru yang berkelanjutan: Analisis penerapan blue accounting pada Kawasan Ekonomi Khusus Kuta Mandalika. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 4(1), 1-14.
- World Bank. (2017). *The Potential of the Blue Economy: Increasing Long-term Benefits of the Sustainable Use of Marine Resources for Small Island Developing States and Coastal Least Developed Countries*. World Bank.
